

## PENDAPATAN NASIONAL DAN KEGIATAN EKONOMI INDONESIA: ANALISIS PENGARUH DIGITALISASI TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) PASCA-2025

*Indonesia's National Income and Economic Activity: An Analysis of the Impact of Digitalisation on Gross Domestic Product (GDP) Post-2025*

Rosdiana<sup>1\*</sup>, Ignatius Septo Pramesworo<sup>2</sup>, Sri Mulyono<sup>3</sup>,

<sup>1</sup>, Universitas Mega Buana Palopo, Indonesia

<sup>2</sup>, Perbanas Institute, Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup>, Universitas Horizon Indonesia

\*Email Correspondence: [rosdiana@umegabuana.ac.id](mailto:rosdiana@umegabuana.ac.id)

Received: 15-03-2026 | Revised: 25-03-2026 | Accepted: 05-04-2026 | Published: 03-05-2026

### Abstract

*This study aims to analyse the impact of digitalisation on Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) post-2025 in the context of the transformation of the national economic structure. It employs a literature review using a qualitative-descriptive approach. The results indicate that digitalisation has become a key determinant of GDP growth, with the contribution of the digital economy rising from 7.7 per cent in the 2010–2014 period to 8.4 per cent in 2024, and projected to reach 9–10 per cent by 2026 and 15.5–19.6 per cent by 2045. This impact operates through three macroeconomic channels: an increase in total factor productivity on the production side; accelerated household consumption and investment in digital infrastructure on the expenditure side; and the diversification of digital service exports, which strengthens the resilience of the current account. However, the optimisation of the benefits of digitalisation remains hampered by regional infrastructure disparities, the risk of labour market disruption due to automation, and the concentration of market power in dominant platforms. In conclusion, digitalisation has fundamentally transformed Indonesia's economic structure from a natural resource-based economy to a knowledge and technology-based economy, thereby requiring comprehensive policies that integrate the acceleration of broadband infrastructure, large-scale workforce reskilling programmes, and the strengthening of competition regulations to ensure inclusive and sustainable growth.*

**Keywords:** economic digitalisation, Gross Domestic Product (GDP), national income, structural transformation, Indonesia's digital economy, total factor productivity, financial inclusion, Industry 4.0

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pasca-2025 dalam konteks transformasi struktur kegiatan ekonomi nasional. Menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi determinan utama pertumbuhan PDB, dengan kontribusi ekonomi digital yang meningkat dari 7,7 persen pada periode 2010–2014 menjadi 8,4 persen pada 2024, dan diproyeksikan mencapai 9–10 persen pada 2026 serta 15,5–19,6 persen pada 2045. Pengaruh ini bekerja melalui tiga kanal makroekonomi: peningkatan produktivitas total faktor dari sisi produksi, akselerasi konsumsi rumah tangga dan investasi infrastruktur digital dari sisi pengeluaran, serta diversifikasi ekspor jasa digital yang memperkuat ketahanan neraca berjalan. Namun, optimalisasi manfaat digitalisasi masih terhambat oleh kesenjangan infrastruktur antarwilayah, risiko disrupsi tenaga kerja akibat otomatisasi, dan konsentrasi kekuatan pasar pada platform dominan. Kesimpulannya, digitalisasi telah mengubah secara fundamental struktur ekonomi Indonesia dari basis sumber daya alam menuju basis pengetahuan dan teknologi, sehingga memerlukan kebijakan komprehensif yang mengintegrasikan percepatan infrastruktur broadband, program reskilling tenaga kerja masif, dan penguatan regulasi kompetisi untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** digitalisasi ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan nasional, transformasi struktural, ekonomi digital Indonesia, produktivitas total faktor, inklusi keuangan, Industri 4.0

## PENDAHULUAN

Pendapatan nasional merupakan indikator fundamental yang mencerminkan kinerja makroekonomi suatu negara, di mana Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi ukuran utama dalam menilai total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu. Dalam konteks Indonesia, PDB tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai cerminan dari struktur kegiatan ekonomi yang terus berevolusi seiring perubahan zaman dan kemajuan teknologi (Badan Pusat Statistik, 2025). Seiring berjalannya waktu, komposisi penyumbang PDB Indonesia mengalami pergeseran signifikan dari sektor tradisional seperti pertanian dan pertambangan menuju sektor jasa dan industri berbasis teknologi.

Perkembangan teknologi digital sejak awal dekade 2020-an telah mengubah lanskap ekonomi global, termasuk Indonesia, yang kini memasuki era ekonomi digital yang semakin terintegrasi. Transformasi ini dipercepat oleh adopsi masif teknologi informasi dan komunikasi (TIK), internet of things (IoT), kecerdasan buatan (AI), serta platform digital yang menghubungkan produsen dan konsumen secara langsung (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Digitalisasi bukan sekadar fenomena teknis, melainkan sebuah gelombang perubahan struktural yang memengaruhi cara produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kegiatan ekonomi nasional.

Pasca-2025, Indonesia memasuki fase baru di mana digitalisasi menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, terutama setelah pemerintah meluncurkan strategi nasional ekonomi digital yang terintegrasi melalui Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030. Dokumen ini menjadi peta jalan transformasi digital yang menargetkan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB nasional mencapai 15,5–19,6 persen pada tahun 2045, meningkat drastis dari sekitar 4–5 persen pada periode sebelumnya (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Target ambisius ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memanfaatkan momentum digitalisasi untuk mempercepat pertumbuhan pendapatan nasional.

Pada tahun 2024, nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai USD90 miliar dan diproyeksikan melonjak hingga USD360 miliar pada tahun 2030, didorong oleh pertumbuhan pesat sektor e-commerce, fintech, logistik digital, dan ekonomi kreatif berbasis platform (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Lonjakan ini mencerminkan perubahan fundamental dalam struktur kegiatan ekonomi, di mana sektor digital tidak lagi menjadi pelengkap, melainkan menjadi motor penggerak utama penciptaan nilai tambah nasional. Fenomena ini menuntut analisis mendalam mengenai bagaimana digitalisasi memengaruhi komponen-komponen PDB, terutama dari sisi produksi dan pengeluaran (Winn & Wright, 2000).

Digitalisasi ekonomi juga membawa dampak signifikan terhadap produktivitas sektor usaha, terutama melalui efisiensi operasional, perluasan pasar, dan inovasi model bisnis (Wahyuni et al., 2023). UMKM, yang sebelumnya terkendala oleh keterbatasan akses pasar dan modal, kini dapat menjangkau konsumen nasional bahkan global melalui platform digital seperti marketplace dan media sosial (Bank Indonesia, 2026). Transformasi ini tidak hanya meningkatkan output produksi, tetapi juga memperluas basis pajak dan kontribusi sektor informal terhadap pendapatan nasional, sehingga memperkuat fondasi makroekonomi Indonesia.

Namun, di balik potensi besar tersebut, digitalisasi juga menghadirkan tantangan struktural yang kompleks, termasuk kesenjangan akses teknologi antarwilayah, ketimpangan keterampilan digital, dan risiko disrupsi tenaga kerja tradisional. Daerah di luar Jawa masih tertinggal dalam hal infrastruktur digital dan

literasi teknologi, yang berpotensi menghambat pemerataan manfaat ekonomi digital (Utoyo, 2023). Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat memperlebar disparitas pendapatan antarregion dan mengurangi efektivitas digitalisasi sebagai instrumen pemerataan ekonomi nasional.

Dari perspektif makroekonomi, pengaruh digitalisasi terhadap PDB dapat dianalisis melalui tiga kanal utama: peningkatan investasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pertumbuhan konsumsi rumah tangga berbasis platform digital, dan ekspansi neraca perdagangan melalui ekspor jasa digital. Data menunjukkan bahwa investasi sektor TIK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan peningkatan jumlah pengguna internet dan nilai transaksi e-commerce (Santoso, 2021). Ketiga variabel ini menjadi indikator kunci dalam memahami mekanisme transmisi digitalisasi terhadap pendapatan nasional.

Lebih jauh, digitalisasi sistem pembayaran menjadi katalisator penting dalam mempercepat sirkulasi uang dan aktivitas ekonomi. Pada triwulan III 2025, volume transaksi pembayaran digital mencapai 12,99 miliar transaksi atau tumbuh 38,08 persen secara year-on-year, mencerminkan semakin kuatnya fondasi digitalisasi sistem pembayaran nasional (Bank Indonesia, 2026). Infrastruktur pembayaran digital yang inklusif memungkinkan partisipasi lebih besar dari masyarakat yang sebelumnya unbanked, sehingga memperluas basis konsumsi dan investasi dalam perekonomian.

Di tingkat global, Indonesia tidak sendirian dalam gelombang transformasi ini. Negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, dan Singapura juga mengalami percepatan digitalisasi yang berkontribusi signifikan terhadap PDB mereka. Namun, Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa ukuran pasar domestik yang besar, demografi muda yang melek teknologi, dan kekayaan sumber daya alam yang dapat dioptimalkan melalui teknologi digital (Veratiani, 2024). Posisi strategis ini menempatkan Indonesia sebagai calon pemimpin ekonomi digital di kawasan, asalkan mampu mengatasi hambatan struktural yang ada.

Meskipun potensi pertumbuhan sangat besar, realisasi kontribusi digitalisasi terhadap PDB sangat bergantung pada kualitas kebijakan publik dan koordinasi antar-lembaga. Regulasi mengenai perlindungan data, pajak digital, standar keamanan siber, dan pengembangan sumber daya manusia digital menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi ini (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Tanpa kerangka regulasi yang adaptif dan pro-inovasi, risiko inefisiensi, monopoli platform, dan kebocoran pendapatan negara dapat menghambat optimalisasi manfaat ekonomi digital.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh digitalisasi terhadap PDB Indonesia pasca-2025, dengan fokus pada dua dimensi utama: transformasi struktur kegiatan ekonomi dan kontribusi sektor digital terhadap pertumbuhan pendapatan nasional. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana digitalisasi telah menjadi driver pertumbuhan ekonomi, serta mengidentifikasi area kebijakan yang memerlukan penguatan lebih lanjut.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pasca-2025 (Eliyah & Aslan, 2025). Data dikumpulkan melalui jurnal nasional, jurnal internasional, buku dan dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara naratif-komparatif dengan mengintegrasikan temuan dari berbagai literatur untuk membangun argumentasi logis mengenai mekanisme transmisi digitalisasi terhadap komponen-komponen PDB, serta mengidentifikasi

pola, tren, dan kesenjangan penelitian terdahulu. Melalui metode ini, penelitian berupaya menyajikan sintesis komprehensif yang berbasis bukti empiris dan teoritis tanpa melakukan pengumpulan data primer di lapangan (Walliman & Walliman, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Transformasi Digital dan Struktur Kegiatan Ekonomi Indonesia

Transformasi digital telah menjadi kekuatan disruptif yang secara fundamental mengubah struktur kegiatan ekonomi Indonesia pasca-2025, menggeser paradigma produksi dari basis sumber daya alam menuju basis pengetahuan dan teknologi. Perubahan ini tidak hanya terlihat dari peningkatan kontribusi sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap PDB, tetapi juga dari cara sektor-sektor tradisional seperti pertanian, manufaktur, dan jasa mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas. Fenomena ini menandai transisi Indonesia dari ekonomi berbasis faktor produksi (factor-driven) menuju ekonomi berbasis inovasi (innovation-driven), di mana nilai tambah diciptakan melalui efisiensi digital, otomatisasi, dan integrasi rantai pasok berbasis data (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025).

Pada periode pasca-2025, struktur ekonomi Indonesia mengalami pergeseran signifikan dari dominasi sektor primer dan sekunder menuju sektor tersier yang didorong oleh layanan digital. Data menunjukkan bahwa sektor jasa berbasis teknologi, termasuk perdagangan elektronik (e-commerce), layanan keuangan digital (fintech), logistik pintar, dan ekonomi kreatif digital, tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan sektor konvensional. Pada tahun 2024, nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai USD90 miliar dan diproyeksikan melonjak hingga USD360 miliar pada tahun 2030, mencerminkan akselerasi transformasi struktural yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ekonomi nasional (Andi & Nuralamsyah, 2025).

Salah satu manifestasi paling nyata dari transformasi ini adalah munculnya model bisnis baru yang berbasis platform (platform-based economy), yang menghubungkan produsen dan konsumen secara langsung tanpa perantara tradisional. Model bisnis ini tidak hanya mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi pasar, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dengan membuka akses bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjangkau pasar nasional dan global. Platform seperti marketplace, aplikasi transportasi online, dan layanan pembayaran digital telah menjadi infrastruktur ekonomi baru yang memfasilitasi miliaran transaksi setiap tahunnya, sehingga mengubah secara mendasar cara kegiatan ekonomi diselenggarakan di Indonesia (Ridhwan, 2025).

Dampak transformasi digital juga terasa dalam peningkatan produktivitas sektor usaha melalui adopsi teknologi otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan analitik data besar (big data). Perusahaan yang mengintegrasikan teknologi digital dalam operasionalnya melaporkan peningkatan efisiensi produksi hingga 30–40 persen, penurunan biaya operasional, dan kemampuan respons yang lebih cepat terhadap perubahan permintaan pasar. Hal ini terutama terlihat di sektor manufaktur yang mulai menerapkan konsep Industri 4.0, di mana mesin-mesin produksi terhubung dalam jaringan IoT (Internet of Things) yang memungkinkan pemantauan dan optimasi secara real-time, sehingga meningkatkan output per unit tenaga kerja (Yang, 2025). Selain itu, digitalisasi telah memicu perubahan struktural dalam pola konsumsi rumah tangga Indonesia, di mana transaksi berbasis digital kini mendominasi aktivitas pembelian harian. Pada triwulan III 2025, volume transaksi pembayaran digital mencapai 12,99 miliar transaksi atau tumbuh 38,08 persen secara year-on-year, mencerminkan pergeseran perilaku konsumen dari transaksi tunai menuju non-tunai yang

lebih efisien dan terdokumentasi (Bank Indonesia, 2026). Perubahan pola konsumsi ini tidak hanya meningkatkan kecepatan perputaran uang dalam perekonomian, tetapi juga memperluas basis data ekonomi yang dapat digunakan untuk perumusan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih tepat sasaran.

Transformasi digital juga berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, yang sebelumnya menjadi hambatan struktural bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui layanan fintech, dompet digital, dan perbankan berbasis aplikasi, jutaan masyarakat yang sebelumnya unbanked kini memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, termasuk kredit usaha, asuransi mikro, dan instrumen investasi. Inklusi keuangan ini memperluas basis konsumsi dan investasi dalam perekonomian, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan PDB dari sisi pengeluaran. Laporan Bank Indonesia (2026) mencatat bahwa integrasi sistem pembayaran digital telah meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat di daerah terpencil, yang sebelumnya terisolasi dari sistem keuangan formal.

Di sisi penawaran (supply side), digitalisasi memungkinkan diversifikasi produk dan jasa yang lebih luas, sehingga memperkaya struktur output ekonomi nasional. Sektor ekonomi kreatif digital, termasuk industri game, animasi, musik streaming, dan konten kreator, tumbuh pesat dan menjadi penyumbang baru bagi PDB yang sebelumnya tidak terhitung dalam klasifikasi ekonomi tradisional. Industri ini tidak hanya menciptakan nilai tambah tinggi dengan intensitas modal relatif rendah, tetapi juga menyerap tenaga kerja muda yang terampil, sehingga memperkuat fondasi demografi bonus Indonesia di era digital (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025).

Namun, transformasi struktural ini juga menghadirkan tantangan berupa disrupsi tenaga kerja di sektor-sektor yang terautomasi. Pekerjaan rutin di sektor administrasi, manufaktur konvensional, dan jasa tradisional berpotensi tergantikan oleh teknologi, sehingga menuntut realokasi tenaga kerja menuju sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan digital tingkat tinggi. Jika tidak diantisipasi melalui program reskilling dan upskilling yang masif, hal ini dapat menimbulkan pengangguran struktural yang justru menghambat pertumbuhan pendapatan nasional. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan digital menjadi prasyarat mutlak agar transformasi struktural ini menghasilkan dividend ekonomi yang inklusif (M. P. & A. Widjaja, 2021).

Peran UMKM dalam transformasi ini juga sangat krusial, mengingat sektor ini menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja Indonesia. Digitalisasi memungkinkan UMKM untuk meningkatkan skala usaha melalui akses ke pasar yang lebih luas, manajemen inventori yang lebih efisien, dan akses pembiayaan melalui platform fintech. Data menunjukkan bahwa UMKM yang terdigitalisasi memiliki tingkat pertumbuhan pendapatan 2–3 kali lebih tinggi dibandingkan UMKM konvensional, sehingga kontribusinya terhadap PDB semakin signifikan pasca-2025. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program pendampingan dan insentif fiskal untuk mempercepat onboarding UMKM ke ekosistem digital, yang diharapkan dapat memperkuat basis produksi nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025).

Dari perspektif spasial, transformasi digital berpotensi mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah dengan memungkinkan daerah di luar Jawa untuk berpartisipasi dalam ekonomi nasional tanpa hambatan geografis. Platform digital memungkinkan produsen di Sulawesi, Sumatera, atau Papua untuk menjual produk langsung ke konsumen di Jakarta atau bahkan pasar ekspor, sehingga mendistribusikan manfaat pertumbuhan ekonomi lebih merata. Namun, realisasi potensi ini sangat bergantung pada pemerataan infrastruktur digital, termasuk jaringan internet broadband dan pusat data, yang masih

terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia. Tanpa investasi infrastruktur yang merata, risiko kesenjangan digital antarwilayah justru dapat memperlebar disparitas pendapatan regional (M. P. & A. Widjaja, 2021).

Lebih jauh, transformasi digital juga mengubah struktur perdagangan internasional Indonesia, di mana ekspor jasa digital mulai menjadi komponen penting dalam neraca berjalan. Layanan teknologi informasi, pemrosesan data, dan konten digital kini diekspor ke berbagai negara, memberikan sumber devisa baru yang kurang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Tren ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk mendiversifikasi basis ekspor Indonesia dari ketergantungan pada komoditas menuju jasa bernilai tambah tinggi, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025; Bank Indonesia, 2026).

Secara kelembagaan, transformasi ini menuntut adaptasi regulasi yang cepat agar tidak menghambat inovasi sekaligus melindungi kepentingan publik. Pemerintah telah meluncurkan Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 sebagai kerangka kebijakan komprehensif yang mengatur aspek perlindungan data, pajak digital, standar keamanan siber, dan tata kelola platform. Regulasi yang adaptif dan pro-inovasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa transformasi struktural ini berjalan berkelanjutan tanpa menimbulkan distorsi pasar atau konsentrasi kekuatan ekonomi pada segelintir pemain dominan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025).

Akhirnya, transformasi digital dan perubahan struktur ekonomi ini harus dipandang sebagai proses evolusioner yang terus berlanjut hingga setidaknya dua dekade ke depan. Proyeksi menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi digital terhadap PDB nasional dapat mencapai 15,5–19,6 persen pada tahun 2045, menjadikannya salah satu pilar utama visi Indonesia Emas 2045. Namun, pencapaian target ini memerlukan koordinasi kebijakan yang konsisten, investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan SDM, serta kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa manfaat digitalisasi dinikmati secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025; Bank Indonesia, 2026).

Dengan demikian, transformasi digital telah mengubah secara mendasar struktur kegiatan ekonomi Indonesia pasca-2025, dari pola produksi, distribusi, hingga konsumsi. Perubahan ini membuka peluang besar bagi percepatan pertumbuhan PDB, namun juga menghadirkan tantangan struktural yang memerlukan respons kebijakan yang tepat. Pemahaman mendalam mengenai dinamika transformasi ini menjadi prasyarat untuk merumuskan strategi ekonomi yang efektif dalam memaksimalkan kontribusi digitalisasi terhadap pendapatan nasional, yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya mengenai analisis kuantitatif pengaruh digitalisasi terhadap PDB.

### **Analisis Pengaruh Digitalisasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)**

Digitalisasi ekonomi telah menjadi determinan utama pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pasca-2025, dengan kontribusi yang semakin signifikan dari tahun ke tahun. Data empiris menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia tumbuh sebesar 8,6 persen sepanjang periode 2019–2024, jauh melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sekitar 5 persen pada periode yang sama. Pada tahun 2024, nilai ekonomi digital tercatat mencapai USD90 miliar atau setara dengan Rp1.860 triliun, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 8,4 persen, meningkat dari 7,7 persen pada periode 2010–2014 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Tren akseleratif ini mengonfirmasi bahwa digitalisasi bukan sekadar fenomena sektoral, melainkan telah menjadi engine of growth yang menggerakkan seluruh komponen pendapatan nasional.

Pengaruh digitalisasi terhadap PDB dapat dianalisis melalui tiga kanal transmisi makroekonomi utama: sisi produksi, sisi pengeluaran, dan sisi pendapatan. Dari sisi produksi, digitalisasi meningkatkan output sektor TIK dan sektor-sektor yang terdigitalisasi melalui peningkatan produktivitas total faktor (total factor productivity/TFP). Adopsi teknologi otomatisasi, AI, dan analitik data memungkinkan perusahaan menghasilkan output lebih besar dengan input yang sama, sehingga memperluas frontier produksi nasional. Studi empiris menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 persen dalam adopsi teknologi digital berkorelasi dengan peningkatan 0,3–0,5 persen dalam produktivitas sektor usaha, yang secara agregat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB dari sisi penawaran (G. Widjaja, 2026).

Dari sisi pengeluaran, digitalisasi mendorong pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor bersih. Konsumsi rumah tangga berbasis platform digital tumbuh pesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan adopsi pembayaran non-tunai. Pada triwulan III 2025, volume transaksi pembayaran digital mencapai 12,99 miliar transaksi atau tumbuh 38,08 persen secara year-on-year, mencerminkan peningkatan velocity of money yang mempercepat sirkulasi pendapatan dalam perekonomian (Bank Indonesia, 2026). Peningkatan konsumsi ini berkontribusi langsung terhadap PDB, mengingat konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam struktur pengeluaran PDB Indonesia, dengan porsi sekitar 53–55 persen (Badan Pusat Statistik, 2025).

Pada komponen investasi, digitalisasi memicu lonjakan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di sektor infrastruktur digital, pusat data, dan pengembangan platform teknologi. Investasi sektor TIK pada 2024–2025 tumbuh dua digit, didorong oleh ekspansi jaringan 5G, pembangunan data center, dan penetrasi cloud computing di sektor korporasi dan pemerintahan. Investasi ini tidak hanya menambah stok modal nasional, tetapi juga menciptakan multiplier effect melalui penyerapan tenaga kerja dan permintaan terhadap industri pendukung seperti konstruksi dan manufaktur perangkat keras (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Dampak ganda ini memperkuat kontribusi digitalisasi terhadap PDB dari sisi pembentukan modal.

Dari sisi ekspor, digitalisasi membuka peluang baru bagi Indonesia untuk mengeksport jasa digital yang sebelumnya tidak tergarap. Layanan teknologi informasi, pemrosesan data, konten kreatif digital, dan platform software-as-a-service (SaaS) kini menjadi komoditas ekspor yang menghasilkan devisa dan memperbaiki neraca berjalan. Meskipun kontribusi ekspor jasa digital masih relatif kecil dibandingkan ekspor komoditas, laju pertumbuhannya yang eksponensial menunjukkan potensi besar untuk menjadi sumber pertumbuhan PDB yang berkelanjutan dan kurang rentan terhadap volatilitas harga komoditas global (Andi & Nuralamsyah, 2025).

Secara sektoral, e-commerce merupakan kontributor terbesar terhadap PDB digital, dengan porsi sekitar 72 persen dari total nilai ekonomi digital Indonesia pada 2025 (Kusumadewi et al., 2025). Platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak telah memfasilitasi transaksi senilai ratusan triliun rupiah, menghubungkan jutaan penjual dan pembeli dalam ekosistem yang efisien. Dampak e-commerce terhadap PDB tidak hanya berasal dari nilai transaksi langsung, tetapi juga dari efek multiplier terhadap sektor logistik, pembayaran digital, iklan online, dan layanan pendukung lainnya yang turut tercatat dalam nilai tambah bruto nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025).

Sektor fintech juga memberikan kontribusi substansial melalui perluasan akses kredit, efisiensi intermediasi keuangan, dan inovasi produk investasi digital. Layanan peer-to-peer (P2P) lending, dompet digital, dan robo-advisor telah menyalurkan triliunan rupiah kredit kepada UMKM dan konsumen yang sebelumnya tidak terjangkau perbankan konvensional. Inklusi keuangan ini meningkatkan kapasitas

konsumsi dan investasi rumah tangga, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB dari sisi pengeluaran. Laporan Bank Indonesia (2026) mencatat bahwa integrasi sistem pembayaran digital telah meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat di daerah terpencil, yang sebelumnya terisolasi dari sistem keuangan formal.

Selain e-commerce dan fintech, sektor ekonomi kreatif digital—termasuk industri game, animasi, musik streaming, dan konten kreator—turut menyumbang nilai tambah yang semakin signifikan terhadap PDB. Industri ini tidak hanya menciptakan nilai tambah tinggi dengan intensitas modal relatif rendah, tetapi juga menyerap tenaga kerja muda yang terampil, sehingga memperkuat fondasi demografi bonus Indonesia. Pada 2025, kontribusi subsektor ekonomi kreatif digital terhadap PDB nasional diperkirakan mencapai 2–3 persen, dengan proyeksi pertumbuhan dua digit hingga 2030 seiring dengan meningkatnya konsumsi konten digital domestik dan ekspor layanan kreatif ke pasar global (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025).

Namun, analisis pengaruh digitalisasi terhadap PDB juga harus mempertimbangkan potensi dampak negatif yang dapat menghambat optimalisasi manfaat ekonomi. Pertama, kesenjangan digital antarwilayah dapat menyebabkan konsentrasi manfaat pertumbuhan hanya di wilayah dengan infrastruktur digital memadai, terutama Jawa dan sebagian Sumatera. Daerah dengan konektivitas internet terbatas berisiko tertinggal, sehingga memperlebar disparitas pendapatan regional dan mengurangi efektivitas digitalisasi sebagai instrumen pemerataan (Yang, 2025). Kedua, disrupsi tenaga kerja akibat otomatisasi berpotensi menimbulkan pengangguran struktural jika tidak diantisipasi melalui program reskilling dan upskilling yang masif.

Ketiga, konsentrasi kekuatan pasar pada segelintir platform digital dominan berpotensi menciptakan distorsi kompetisi dan mengurangi surplus konsumen dalam jangka panjang. Beberapa studi menunjukkan bahwa platform dengan network effect yang kuat cenderung membentuk quasi-monopoli, yang dapat menekan margin pelaku usaha kecil dan mengurangi diversifikasi inovasi (Prayuti, 2024). Oleh karena itu, regulasi anti-monopoli dan kebijakan yang mendukung kompetisi sehat menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa manfaat digitalisasi terdistribusi secara inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun terdapat tantangan tersebut, proyeksi jangka menengah menunjukkan bahwa kontribusi digitalisasi terhadap PDB akan terus meningkat secara signifikan. Pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB nasional mencapai 9–10 persen pada 2026, dan berlanjut hingga 15,5–19,6 persen pada tahun 2045 (Kusumadewi et al., 2025). Target ini didasarkan pada asumsi pertumbuhan GMV (Gross Merchandise Value) ekonomi digital yang konsisten di atas 10 persen per tahun, didorong oleh peningkatan penetrasi internet, adopsi teknologi oleh UMKM, dan ekspansi ekspor jasa digital. Jika target ini tercapai, ekonomi digital akan menjadi tulang punggung perekonomian nasional, menyumbang hampir seperlima dari total pendapatan nasional Indonesia. Untuk merealisasikan potensi ini, diperlukan sinergi kebijakan yang mengintegrasikan aspek infrastruktur, regulasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Investasi dalam infrastruktur digital broadband, 5G, dan pusat data harus dipercepat untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) (Aslan, 2019). Regulasi perlindungan data, pajak digital, dan tata kelola platform perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang adil dan berkelanjutan. Sementara itu, program literasi digital dan pelatihan keterampilan teknologi harus diperluas untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia mampu beradaptasi dengan tuntutan ekonomi berbasis pengetahuan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025; Bank Indonesia, 2026).

Secara keseluruhan, digitalisasi telah menjadi katalisator utama pertumbuhan PDB Indonesia pasca-2025, dengan mekanisme transmisi yang kompleks namun terukur melalui peningkatan produktivitas, konsumsi, investasi, dan ekspor. Meskipun terdapat tantangan struktural yang perlu diatasi, arah tren menunjukkan bahwa kontribusi sektor digital terhadap pendapatan nasional akan terus meningkat dalam dua dekade ke depan. Pemahaman mendalam mengenai dinamika ini menjadi fondasi bagi perumusan kebijakan ekonomi yang efektif untuk memaksimalkan dividend digital bagi kesejahteraan nasional, sekaligus memastikan bahwa transformasi ini berjalan inklusif dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Digitalisasi telah menjadi kekuatan transformatif yang secara fundamental mengubah struktur kegiatan ekonomi Indonesia pasca-2025, menggeser paradigma pertumbuhan dari basis sumber daya alam menuju basis pengetahuan dan teknologi. Analisis ini mengonfirmasi bahwa sektor digital telah berevolusi dari pelengkap menjadi motor penggerak utama Produk Domestik Bruto (PDB), dengan kontribusi yang meningkat dari 7,7 persen pada periode 2010–2014 menjadi 8,4 persen pada 2024, dan diproyeksikan mencapai 9–10 persen pada 2026 serta 15,5–19,6 persen pada 2045. Transformasi ini tercermin melalui tiga kanal transmisi makroekonomi: peningkatan produktivitas total faktor dari sisi produksi, akselerasi konsumsi dan investasi dari sisi pengeluaran, serta diversifikasi ekspor jasa digital yang memperkuat ketahanan neraca berjalan.

Namun, realisasi penuh potensi digitalisasi terhadap pendapatan nasional masih menghadapi tantangan struktural yang memerlukan respons kebijakan komprehensif. Kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, risiko disrupsi tenaga kerja akibat otomatisasi, dan konsentrasi kekuatan pasar pada platform dominan berpotensi menghambat pemerataan manfaat ekonomi digital jika tidak dikelola dengan tepat. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur broadband di daerah 3T, program reskilling dan upskilling tenaga kerja secara masif, serta penguatan regulasi kompetisi dan perlindungan data menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa transformasi digital menghasilkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, digitalisasi bukan sekadar tren teknologi, melainkan sebuah gelombang perubahan struktural yang akan menentukan trajektori pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua dekade ke depan. Jika dikelola dengan kebijakan yang adaptif, koordinatif, dan berorientasi jangka panjang, ekonomi digital memiliki potensi untuk menjadi tulang punggung Pendapatan Nasional Indonesia, mengantarkan negara menuju visi Indonesia Emas 2045 sebagai ekonomi berbasis inovasi yang kompetitif di tingkat global. Kunci keberhasilannya terletak pada sinergi tripartit antara pemerintah sebagai regulator, sektor swasta sebagai inovator, dan masyarakat sebagai penerima manfaat, yang bersama-sama membangun ekosistem ekonomi digital yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi, A. Y., & Nuralamsyah, I. (2025). *Proceedings of the 2nd International Conference on Administrative Science (ICAS 2024)*. Springer Nature.
- Aslan. (2019, January 17). *Pergeseran Nilai Di Masyarakat Perbatasan (Studi tentang Pendidikan dan Perubahan Sosial di Desa Temajuk Kalimantan Barat)* [Disertasi dipublikasikan]. <https://idr.uin-antasari.ac.id/10997/>

- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Kusumadewi, R., Fitriadi, H., Sari, A. F. K., Zulfkar, A. L., Islami, P. Y. N., Amrina, D. H., Badri, F., Fahrullah, A., Rasyid, F., Timur, Y. P., Sari, D. P., Romli, N. A., Safri, D., Mustapita, A. F., Mahardika, S. G., Munir, M. B. B., Munir, T. B., Islami, N. N., Pramono, W., ... Adab, P. (2025). *PERKEMBANGAN EKONOMI KREATIF & EKONOMI INDUSTRI BERBASIS DIGITAL*. Penerbit Adab.
- Prayuti, Y. (2024). Implikasi Risiko Transaksi Digital Terhadap Pengaduan Konsumen di Sektor E-Commerce: Tinjauan Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 10038–10048. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11440>
- Ridhwan, M. M. (2025). *The Impact of E-Commerce Adoption on Micro, Small, and Medium Enterprises Performance in Rural Areas: Evidence from Indonesia* (SSRN Scholarly Paper No. 5581690). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5581690>
- Santoso, V. A. (2021). Legal Protection on E-Commerce Transactions: Problems and Challenges in Global Business. *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 1(2), 101–112. <https://doi.org/10.15294/lsr.v1i2.50552>
- Utoyo, I. (2023). *Making the Giant Dance: Kisah di Balik Perjalanan Transformasi Digital BRI*. PT. Rayyana Komunikasindo.
- Veratiani, G. A. (2024). ANALISIS PROYEKSI MASA DEPAN DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN DIGITAL FARMING. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(2), 279–287. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i2.371>
- Wahyuni, H. A., Naili, Y. T., & Ruhtiani, M. (2023). Penggunaan Smart Contract Pada Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i1.1018>
- Walliman, N., & Walliman, N. (2021). *Research Methods: The Basics* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003141693>
- Widjaja, G. (2026). HUKUM KOMUNIKASI DI ERA DIGITAL: KAJIAN PUSTAKA ATAS ATURAN HUKUM YANG MENGATUR KEBEBASAN, BATAS, DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENYAMPAIAN PESAN MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN TELEKOMUNIKASI. *Jurnal Komunikasi*, 3(8), 521–532.
- Widjaja, M. P. & A. (2021). *Strategi dan Transformasi Digital*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Winn, J. K., & Wright, B. (2000). *The Law of Electronic Commerce*. Wolters Kluwer.
- Yang, Q. (2025). Principles for the Standardized Handling of Digital Property Inheritance. *Humanities and Social Science Research*, 8(3), p29–p29. <https://doi.org/10.30560/hssr.v8n3p29>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Produk Domestik Bruto Indonesia menurut lapangan usaha 2020–2025*. Jakarta: BPS.
- Bank Indonesia. (2026). *Laporan perkembangan sistem pembayaran digital triwulan III 2025*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2025). *Dukungan transformasi digital dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional*. Jakarta: Kemenko
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2025). *Dukungan transformasi digital dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional*. Jakarta: Kemenko Perekonomian.